BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah merupakan suatu sistem kehidupan yang meliputi semua aspek kehidupan. Salah satu aspek yang diatur pula dalam Islam adalah politik. Dalam perspektif Islam, politik dapat diposisikan sebagai instrumen dakwah. Karena itu, kekuasaan yang diberikan oleh rakyat pada hakikatnya adalah suatu amanah. Maka kekuasaan atau jabatan apa pun yang dipangku oleh seseorang muslim haruslah dinisbahkan dengan pertanggungjawaban. Di sinilah dituntut bahwa berpolitik perlu memperhatikan akhlak, etika, aspirasi rakyat, dan tuntunan nilai-nalai Islam.[1]

Politik adalah salah satu aspek yang diatur dalam Islam. Hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw ketika Hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad Saw menciptakan suatu kekuatan sosial-politik dalam sebuah Negara Madinah. Hal yang pertama dilakukan Nabi Muhammad Saw di Madinah dalam rangka pembentukan sebuah negara adalah membuat Piagam Madinah pada tahun pertama Hijriyah. Piagam yang berisi 47 pasal ini memuat peraturan-peraturan dan hubungan antara berbagai komunitas dalam masyarakat Madinah yang mejemuk. Di negara baru ini Nabi Muhammad bertindak sebagai Kepala Negara dengan piagam Madinah sebagai Konstitusinya.[2] Pakar ilmu politik Islam

---

[1]Sahar L. Hassan, Kuat Sukardiyono dan Dadi M.H. Basri, *Memilih Partai Islam Visi, Misi, dan Persepsi* (Jakarta : Gema Insani, 1998), hlm. 13.

[2]Muhammad Iqbal., *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 33

beranggapan bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam yang pertama dan yang dirikan oleh Nabi Muhammad di Madinah.[3]

Terwujudnya Piagam Madinah merupakan bukti sifat kenegarawan Muhammad. Beliau tidak hanya mementingkan umat Islam, tetapi juga mengakomodasi kepentingan orang-orang Yahudi dan mempersatukan kedua umat serumpun ini di bawah kepemimpinannya. Bagi umat Islam, Nabi Muhammad berhasil menciptakan persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di antara kaum Muhajirin dan Ansar, juga antara suku-suku kalangan Ansar sendiri. Di kalangan Ansar, Nabi diakui telah merekat kembali hubungan antar suku yang sebelumnya selalu bermusuhan.[4]

Setelah Rasulullah Saw wafat kepemimpinan beliau dilanjutkutkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Abu Bakar berusaha konsisten dengan sistem yang berlaku pada masa hidup Rasulullah. Setelah Abu Bakar wafat, Umar diangkat sebagai khalifah kedua. Umar menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun dari 13H-23H (634-644 M). Dalam masa pemerintahannya, ia berhasil membebaskan negeri-negeri jajahan imperium Romawi dan Persia, seperti Suriah, Persia, Mesir, dan Pelestina, serta membebaskan Baitul Maqdis dari pendudukan Romawi. Karena wilayah kekuasaan Islam semakin luas, maka pemerintahannya dilengkapi dengan lembaga-lembaga politik, dengan tugas antara lain mengatur hubungan antara daerah taklukan dan pemerintahan pusat. Bangunan dasar negara Islam sudah

---

[3]H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 10.

[4]*Op.Cit*, hlm. 33-34.

mulai dilembagakan, yang strukturnya kemudian dikembangkan oleh pemerintahan Dinasti Ummayah.

Setelah Umar wafat maka khalifah digantikan oleh Utsman bin Affan. Masa pemerintahan berlangsung selama 12 tahun, yaitu 23-35 H (644-656). Masa kepemimpinan Utsman ditandai oleh perpecahan. Hal ini berbeda dengan dua khalifah sebelumnya, yang walaupun proses pemilihannya diperselisihkan, setelah khalifah menimbulkan kelompok pembangkang, seperti gerakan separatis Irak dan Mesir. Setelah Utsman wafat khalifah digantikan Ali bin Abi Thalib masa pemerintahan Ali juga dibayang-bayangi oleh pertentangan, yang semakin tampak sejak terbunuhnya Utsman.[5]

Di Indonesia Politik Islam bisa dilihat dari Semangat tokoh Islam mendirikan partai politik sejak permulaan abad ke-20. Sejarah bangsa ini mencatat, Sarekat Dagang Islam yang didirikan Samanhudi, yang tadinya merupakan perkumpulan bercorak niaga, tak lama kemudian berubah menjadi gerekan politik Islam di bawah ancaman kebijakan Belanda yang menetapkan pemisahan antara negara dan agama. Dalam pengertian, Belanda kala itu ingin memaksukan umat Islam ke dalam kotak *Islam 'Ubu@diah* belaka atau Islam kultural semata, agar kekuatan Islam yang besar tidak menjadi kekuatan politik yang potensial untuk menggoyang eksistensi penjajah Belanda. Akan tetapi ketika itu, tokoh Islam yang memahami bahwa adalah mustahil memisahkan agama (termasuk politik Islam) dari kekuasaan kenegaraan, dengan segala daya menerobos rambu-rambu yang dibuat Belanda, sehingga kemudian lahirlah

---

[5]Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hlm. 102-106.

berbagai partai politik Islam, baik secara langsung bersikap *non*kooperatif atau berpura-pura kooperatif (bekerja sama). Buah dari semua itu adalah terbangunnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta menguatnya kesadaran atas kemerdekaan.[6]

Munculnya partai-partai Islam di Indonesia, setelah selama bertahun-tahun sejak rezim Orde lama di bawah Soekarno partai Islam seperti Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dibubarkan, demikian pula Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Nahdltul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam maka politisi muslim kehilangan ruang artikulasi politik secara nyata dan tegas. Situasi semacam itu terus berlangsung sampai dengan rezim orde baru berkuasa, yang hanya membolehkan adanya tiga partai politik di Indonesia, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gabungan dari banyak partai Islam dan mazhab keislaman, Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Serta harus diingat ketiga partai harus mengusung asas dan dasar Pancasila bukan yang lain, padahal sebagian umat Islam yang aktif dalam politik tetap berkehendak menjadi Islam sebagai dasar dan asas partai tetapi Soeharto tidak mengizinkan. Tahun 1984-1985 terbitlah UU politik yang melarang partai atau ormas keagamaan berasaskan di luar Pancasila. Siapa yang berani melawan maka sudah dapat dipastikan hukumannya yakni dibubarkan.

Kondisi seperti itu berakhir pada tahun 1998, setelah negara dihujani kritik keras secara terus menerus oleh berbagai kalangan. Termasuk intelektual dan mahasiswa serta aktivis LSM dan demokrasi, rezim orde baru di bawah Soeharto

---

[6]*Op.Cit*, hlm. 139-140.

mengundurkan diri digantikan Habibie, dimana Soeharto tidak memertanggungjawabkan kepemimpinannya selama 32 tahun. Namun anehnya, tak seorang pun dari 200 juta penduduk ketika itu, tidak ada yang bisa memaksanya untuk bertanggungjawab. Namun, di lapangan lainnya, *euphoria* masyarakat atas turunnya Soeharto demikian meluap-luap. Luapan kegembiraan dapat disaksikan di antara berdirinya partai politik yang mencapai 181 partai sebagai bentuk yang diandaikan dapat menjadi saluran aspirasi masyarakat setelah selama 32 tahun dipasung. Di antara 181 partai inilah terdapat partai-partai Islam turut pula mengambil hikmah dari gelombang reformasi 1998.[7]

Semangat untuk mendirikan partai politik Islam yang tidak pernah surut dari Pemilu ke Pemilu ternyata tidak berbanding lurus dengan perolehan suara yang diraihnya. Bahkan dibandingkan dengan pemilu pertama yang dilaksanakan di Indonesia (1955), perolehan suara partai politik Islam di era reformasi jauh di bawahnya. Pada Pemilu 1955, total kursi partai politik Islam, seperti Masyumi, Partai NU, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Politik Tarikat Islam adalah 155 kursi atau 43,72 persen suara. Sementara total kursi partai politik Islam di era reformasi (1999) hanya 84 kursi atau 17,23 persen suara. Kemerosotan perolehan kursi atau suara partai politik Islam pada era reformasi dibandingkan dengan era sebelumnya karena beberapa faktor. pertama, jumlah partai politik Islam yang semakin banyak di era reformasi. Hal ini menyebabkan konsentrasi suara umat Islam terpecah ke dalam banyak partai Islam. Kedua, semakin mencairnya orientasi politik umat Islam terhadap

[7]Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam: Kontestasi Islam Politik dan Demokrasi diIndonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 195-197.

partai politik Islam. Sekularisasi politik yang berlangsung selama orde baru telah ikut mengubah orientasi politik umat Islam yang tidak lagi mengidentikkan partai dengan Islam.[8]

Perkembangan jumlah partai politik berasaskan Islam, selanjutnya disebut partai politik Islam. Di era reformasi cenderung menurun. Pada pemilu 1999, dari 48 partai politk yang mengikuti pemilu, tercatat 13 partai politik Islam dan hanya 7 partai yang mendapatkan kursi di DPR RI, yaitu PPP, Partai Keadilan, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nahdlatul Ummah, Partai Persatuan, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Kebangkitan Umat.

Pada pemilu 2004 dari 24 partai politik terdapat 5 partai politik Islam yang ikut pemilu dan hanya 4 partai yang mendapatkan kursi di DPR RI, yaitu PPP, Partai Keadilan sejahtera (PKS), PBB, dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Pada pemilu 2009 dari 38 partai politik nasional terdapat 7 partai politik Islam yang ikut pemilu dan hanya 2 partai yang yang mendapatkan kursi di DPR RI, yaitu PPP dan PKS. Pada Pemilu 2014 dari 3 partai politik Islam yang ikut bertarungan 9 partai lainnya, hanya 2 partai yang berhasil mendapatkan kursi di DPR RI, yaitu PPP dan PKS, sementara PBB gagal memenuhi standar minimal *parliamentary treshold*.

Dalam hal perolehan jumlah kursi di DPR RI sejak era reformasi, partai politik Islam mengalami fluktuasi. Pada pemilu 1999 total perolehan kursi partai

[8]A. Bakir Ihsan, Ideologi Islam dan Partai Partai Politik, (Jakarta: Orbit, 2016), hlm. 4-5.

politik Islam adalah 84 kursi, pada pemilu 2004 berjumlah 128 kursi, pada pemilu 2009 memperoleh 94 kursi, dan Pemilu 2014 memperoleh 79 kursi.[9]

Dari uraian diatas kita mengetahui bagaimana eksistensi partai politik Islam dalam pemilu yang selalu sulit bersaing dengan partai politik yang bukan berbasis Islam sedangkan kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang mayoritasya beragama Islam. Oleh sebab itu, penulis ingin meniliti lebih lanjut, apa yang menyebabkan partai politik Islam sulit bersaing dengan partai politik yang bukan berbasis Islam, untuk mengetahui itu penulis meneliti lewat persepsi dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antsari Banjarmasin tentang hal tersebut ? karena menurut penulis, dosen adalah insan akademis yang mempunyai lebih dari masyarakat secara umum dan dosen juga adalah kalangan yang dianggap telah mengetahui dan memahami masalah-masalah hukum dan permasalahan politik di Indonesia.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **"PERSEPSI DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM UIN ANTASARI BANJARMASIN TENTANG EKSISTENSI PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PEMILU".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[9]*Ibid*, hlm. 6-7.

1. Bagaimana persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin tentang eksistensi partai politik Islam dalam Pemilu?
2. Bagaimana persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari tentang kendala dan tantangan partai politik Islam dalam Pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin tentang Eksistensi Partai Politik Islam dalam Pemilu dan,
2. Untuk mengetahuiPersepsi Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin tentangkendala dan tantangan Partai Politik Islam dalam Pemilu.

D. Signifikansi Penulisan

1. Bahan informasi ilmiah dalam kesyariahan khususnya bidang Hukum Tata Negara,
2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya serta pembaca pada umumnya,
3. Bahan informasi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian serta lebih mendalam tentang masalah ini dan,

4. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.

E. Defenisi Operasional

Agar memperjelas maksud dari judul penelitian, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi berasal dari bahasa latin, *percipere,* menerima, *perceptio*, pengumpulan, penerimaan, pandangan, pengertian. Dari istilah tersebut penulis mengambil arti kata pandangan dari istilah persepsi yang sesuai dengan judul penulis yaitu pandangan Dosen UIN Antasari Banjarmasin Tentang Eksistensi Partai Islam di dalam Pemilu,[10]
2. Eksistensi adalah keberadaan, maksud dari penulis disini ialah keberadaan Partai Politik Islam di dalam Pemilu dan,[11]
3. Partai Politik Islam adalah sebuah organisasi permanen yang beranggotakan orang-orang Islam yang bertujuan untuk melakukan aktivitas politik sesuai dengan ketentuan Syariah Islam.[12]

---

[10]Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus IstilahKarya Tulis Ilmiah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hlm. 191.

[11]*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1994), hlm. 253.

[12]Fatahullah Jurdi, *Politik Islam* (Yogyakarta : Calpulis, 2016), hlm. 129.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahn yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti.

1. Oleh Noor Alimah (0501136791) Jurusan Siyasah Jinayah judul Skripsi Perjalanan partai politik Islam Era Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi, peneliti ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pokok masalah penelitian ini adalah menganalisis bagaimana perjalanan partai politik Islam Era Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dari segi jenis penelitian, peneliti disini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Dan dari segi judul peneliti lebih menitikberatkan perjalanan partai politik Islam Era Orde lama, Era Orde Baru dan Era Orde Reformasi, sedangkan penulis lebih menitikberatkan Persepsi Dosen tentang eksistensi partai politik Islam dalam Pemilu dan,
2. Oleh Pahrul (0701137901) Jurusan Siyasah Jinayah judul Skripsi Konsep Partai Politik Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan *(library research).* Pokok Masalah penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana Konsep Partai Politik Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani.Perbedaaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada jenis penelitian, peneliti disini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan penulis

menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*), dan dari judul peneliti menitikberatkan bagaimana konsep politik Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, sedangkan penulis lebih menitikberatkan persepsi dosen tentang eksistensi partai politik Islam dalam Pemilu.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis. Dalam sitematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba mericikannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori, merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Berisikan pengertian partai politik Islam, dasar hukum partai politik, tujuan dan fungsi partai politik dan perjalanan partai politik Islam di Indonesia.

Bab III berisi motode penelitian, yang memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data, serta tahapan penelitian.

Bab IV menyajikan laporan hasil penelitian, dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisanya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah,

yaitu berisi tentang hasil dan analisa data serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

Bab Vmerupakan penutup, pada bab ini penulis membuat simpulan atau hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitiannya.